



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BIMA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD FAKHRUNRAJI
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 108846

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.989.000.000**

1. Tanah Seluas 2.882 m2 di KAB / KOTA BIMA, Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 2.133 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 661 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 846 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 938 m2/359 m2 di KAB / KOTA BIMA, Rp. 950.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 1.098 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , Rp. 276.000.000
8. Tanah Seluas 1.414 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
9. Tanah Seluas 1.827 m2 di KAB / KOTA BIMA, Rp. 570.000.000
10. Tanah Seluas 2.942 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 1.080.000.000
11. Tanah Seluas 1.723 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 204.000.000
12. Tanah Seluas 2.409 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , Rp.



360.000.000

13. Tanah Seluas 607 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL

SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

74.500.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.

70.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL

SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

283.500.000**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

1.816.391.617**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

Sub Total

Rp.

7.163.391.617**III. HUTANG**

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.163.391.617**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.